



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan berbagai teori dasar yang relevan dengan topik penelitian ini. Peneliti juga menyajikan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian ini. Landasan teori dan penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyertakan kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai panduan untuk memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

a. Definisi Teori Agensi

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976 : 5-7) adalah perjanjian di mana satu pihak atau lebih (prinsipal) menunjuk pihak lain (agen) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama mereka. Dalam proses ini, prinsipal mendelegasikan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Ketika kedua pihak berorientasi pada upaya memaksimalkan utilitas, terdapat kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Untuk mengatasi potensi konflik ini, prinsipal dapat memberikan insentif kepada agen serta mengalokasikan biaya tertentu untuk memantau tindakan agen dan mengurangi risiko perilaku yang tidak sesuai.

Dalam situasi tertentu, prinsipal juga dapat memberikan kompensasi kepada agen untuk memastikan bahwa agen tidak mengambil tindakan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merugikan prinsipal. Kompensasi ini dapat berupa biaya tambahan yang digunakan untuk memberikan jaminan atau sebagai pengganti atas kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan agen. Namun demikian, hampir tidak mungkin bagi prinsipal dan agen untuk menjamin pengambilan keputusan yang optimal tanpa biaya. Oleh karena itu, dalam hubungan keagenan, baik prinsipal maupun agen umumnya akan menanggung biaya monitoring dan biaya jaminan, serta menghadapi perbedaan antara keputusan agen dan keputusan yang ideal untuk kepentingan prinsipal. Perbedaan ini dikenal sebagai kerugian residual dan biaya-biaya yang dikeluarkan ini disebut biaya agensi (Jensen dan Meckling, 1976).

Biaya agensi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- (1) Biaya pemantauan oleh prinsipal, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal.
- (2) Biaya jaminan oleh agen, yaitu pengeluaran agen untuk menunjukkan komitmen kepada kepentingan prinsipal.
- (3) Kerugian residual, yaitu penurunan kesejahteraan prinsipal akibat perbedaan keputusan agen dan keputusan yang optimal bagi perusahaan.

Biaya keagenan tidak hanya terjadi dalam hubungan prinsipal-agen yang eksplisit, tetapi juga muncul dalam berbagai situasi kerja sama yang melibatkan lebih dari satu individu. Masalah ini dapat ditemukan di berbagai organisasi, seperti perusahaan, universitas, koperasi, badan pemerintah, serikat pekerja, hingga hubungan komersial lain seperti pasar seni dan real estat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam konteks hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan, hubungan keagenan sesuai dengan definisi hubungan keagenan yang murni. Isu terkait "pemisahan kepemilikan dan kontrol" pada perusahaan modern dengan struktur kepemilikan yang tersebar erat hubungannya dengan masalah keagenan. Prinsipal (pemegang saham) mengharapkan manajer (agen) untuk bertindak demi memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, ketidakpastian dan keterbatasan dalam pemantauan sering kali menjadi hambatan dalam proses tersebut.

Pendekatan teori keagenan dapat dilihat dari dua sudut pandang:

- (1) Aspek Normatif, yang berfokus pada bagaimana merancang hubungan kontraktual, termasuk insentif kompensasi, agar agen termotivasi untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.
- (2) Aspek Positif, yang menelaah insentif yang dihadapi oleh masing-masing pihak serta faktor-faktor yang memengaruhi bentuk kontrak keseimbangan dalam hubungan keagenan.

Teori agensi menurut Eisenhardt (1989 : 58) berfokus pada penyelesaian dua permasalahan utama dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Permasalahan pertama adalah konflik keagenan, yang muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan atau keinginan prinsipal dan agen, serta sulit atau memerlukan biaya besar bagi prinsipal untuk memverifikasi tindakan agen, sehingga tidak dapat dipastikan apakah agen telah bertindak sesuai harapan. Permasalahan kedua adalah perbedaan pembagian risiko, di mana prinsipal dan agen memiliki preferensi risiko yang berbeda, menyebabkan mereka cenderung mengambil langkah yang tidak selaras. Teori ini menjadikan kontrak sebagai elemen kunci dalam mengatur

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

hubungan antara prinsipal dan agen. Fokus utamanya adalah menentukan kontrak yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi terkait manusia (seperti kepentingan pribadi, rasionalitas terbatas, dan keengganan terhadap risiko), organisasi (seperti konflik tujuan antar anggota), serta informasi (yang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperoleh).

Teori agensi menurut Scott dan O'Brien (2019 : 362) adalah konsep yang mempelajari bagaimana merancang kontrak untuk mendorong agen yang rasional agar bertindak demi kepentingan prinsipal yang juga rasional, meskipun terdapat potensi konflik antara kepentingan keduanya. Kontrak dalam teori keagenan memiliki unsur permainan kooperatif dan non-kooperatif. Unsur non-kooperatif terlihat karena kontrak tidak secara spesifik mengatur tindakan tertentu, melainkan memotivasi masing-masing pihak untuk bertindak berdasarkan rasionalitas dan kepentingan pribadi. Namun, kontrak juga bersifat kooperatif karena kedua belah pihak harus berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan, seperti tidak menyalahgunakan keuntungan atau melanggar perjanjian. Komitmen ini dijamin melalui mekanisme hukum, etika, dan reputasi masing-masing pihak. Oleh karena itu, kontrak dalam teori keagenan dapat dianggap sebagai bentuk permainan kooperatif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

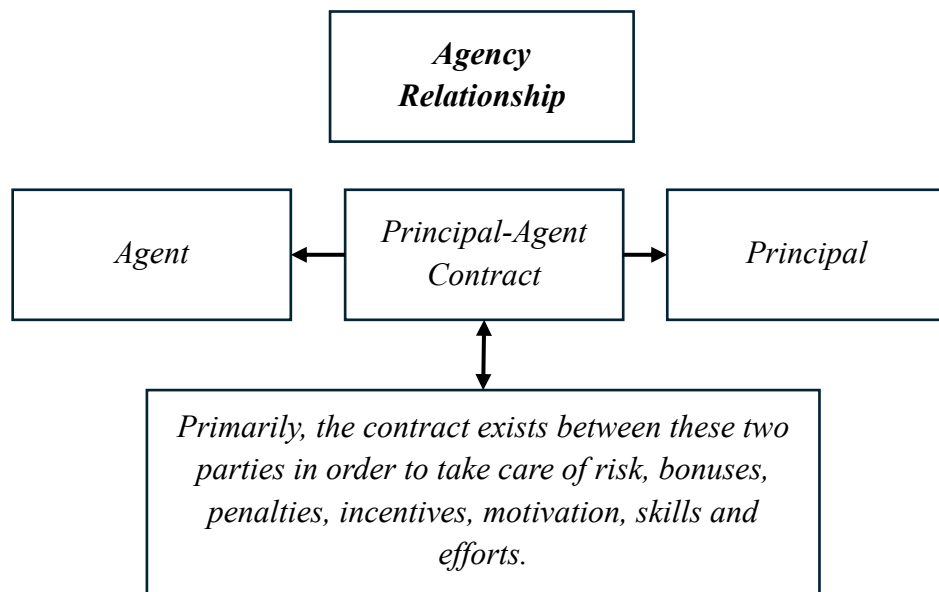
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Agency Relationship



Sumber: Moloji dan Marwala (2020)

Berdasarkan gambar 2.1 teori agensi menggambarkan hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemilik atau pemberi tugas) dan agen (pihak yang melaksanakan tugas tersebut). Gambar 2.1 menggambarkan hubungan ini, di mana kontrak berfungsi untuk mengatur aspek-aspek seperti risiko, insentif, bonus, dan pengawasan terhadap tindakan agen. Dalam hubungan ini, prinsipal berusaha memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan keinginan mereka, namun karena keterbatasan dalam memantau kegiatan sehari-hari agen, sering kali muncul masalah seperti *adverse selection* dan *moral hazard* (Moloji dan Marwala, 2020).

Menurut Eisenhardt (1989), masalah *adverse selection* muncul akibat ketidaksempurnaan informasi antara prinsipal dan agen. Ketika prinsipal tidak dapat mengawasi kegiatan agen secara langsung, maka agen memiliki informasi yang lebih banyak, yang bisa menyebabkan keputusan yang dibuat oleh agen tidak selalu mencerminkan kepentingan prinsipal. Di sisi lain,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masalah *moral hazard* terjadi ketika kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda terhadap risiko, yang mengarah pada perbedaan dalam perilaku atau keputusan yang diambil. Oleh karena itu, kontrak antara prinsipal dan agen dirancang untuk meminimalkan risiko ini dengan memberikan insentif dan hukuman agar perilaku agen lebih selaras dengan tujuan prinsipal (Moloi dan Marwala, 2020).

b. Keterkaitan Teori Agensi terhadap Kualitas *Carbon Emission Disclosure*

Teori agensi relevan untuk menjelaskan hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan peningkatan kinerja lingkungan perusahaan. Teori ini menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Dengan menyediakan informasi yang transparan tentang emisi karbon, perusahaan tidak hanya memenuhi harapan pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas internal dan eksternal. Proses ini mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengelola dampak lingkungan melalui penerapan langkah-langkah seperti efisiensi energi dan adopsi teknologi hijau, sehingga meminimalkan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan lingkungan (Imansari et al., 2024).

Teori agensi digunakan untuk menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan dalam mendorong pengungkapan emisi karbon. Pengungkapan ini dipandang sebagai salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan, di mana direksi, komisaris independen, dan komite audit memainkan peran penting dalam memastikan bahwa manajemen menjalankan praktik yang transparan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan tata kelola yang baik, perusahaan dapat

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi masalah asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan risiko emisi karbon yang lebih efektif (Afnilia dan Christina Dwi Astuti, 2023).

2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

a. Definisi Teori Kepatuhan

Menurut Scholz (1984 : 180-182) teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana individu atau organisasi didorong untuk mematuhi aturan, regulasi, atau norma melalui kombinasi pendekatan strategis. Scholz mengidentifikasi dua pendekatan utama dalam teori kepatuhan, yaitu strategi pencegahan (*deterrence*) dan strategi kooperatif (*cooperative*).

(1) Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan menekankan pada pengawasan ketat dan penerapan sanksi bagi pelanggaran sebagai cara untuk memastikan kepatuhan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa individu atau organisasi cenderung mematuhi aturan jika mereka menghadapi risiko yang tinggi dari konsekuensi negatif, seperti denda, hukuman, atau kerugian reputasi. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera (*deterrence effect*), sehingga pelanggaran dapat diminimalkan melalui ancaman sanksi.

(2) Strategi Kooperatif

Sebaliknya, strategi kooperatif mengandalkan persuasi, dialog, dan penyesuaian fleksibel terhadap situasi tertentu. Pendekatan ini berasumsi bahwa kepatuhan dapat dicapai dengan menciptakan hubungan saling percaya antara regulator dan yang diatur. Regulator dalam pendekatan ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

lebih berperan sebagai mitra yang membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan aturan, sehingga mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama.

Teori kepatuhan mencakup dimensi kompleks, termasuk faktor motivasi internal (seperti nilai dan norma pribadi) dan faktor eksternal (seperti insentif atau ancaman hukuman). Scholz juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi strategi pencegahan dan kooperatif bergantung pada konteks spesifik, seperti sifat aturan, tingkat pengawasan, serta hubungan antara regulator dan entitas yang diatur. Dengan demikian, teori kepatuhan tidak hanya berfokus pada bagaimana aturan ditegakkan, tetapi juga pada bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memastikan bahwa individu atau organisasi secara sukarela mematuhi aturan.

Menurut Tyler (1990 : 3-7) teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan alasan mengapa individu mematuhi hukum dan aturan. Teori ini mengidentifikasi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan instrumental, dalam memahami motivasi seseorang untuk patuh.

(1) Pendekatan Normatif

Pendekatan ini berfokus pada keyakinan individu terhadap keadilan dan legitimasi hukum atau otoritas. Orang patuh karena mereka percaya bahwa hukum atau otoritas memiliki hak moral untuk mengatur perilaku mereka, dan aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut. Aspek-aspek seperti keadilan prosedural, netralitas, kesopanan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan secara normatif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Pendekatan Instrumental

Pendekatan instrumental melihat kepatuhan sebagai hasil dari evaluasi rasional individu terhadap keuntungan dan kerugian. Orang mematuhi aturan karena adanya konsekuensi langsung, seperti sanksi atau hukuman, jika aturan dilanggar. Dengan pendekatan ini, kepatuhan lebih didorong oleh perhitungan risiko dan manfaat, serta efek pencegahan dari ancaman hukuman.

Teori ini mencakup dimensi kompleks, baik dari segi motivasi internal maupun eksternal, yang mencerminkan bagaimana individu merespons otoritas hukum. Pendekatan normatif lebih menekankan nilai dan keadilan, sementara pendekatan instrumental berfokus pada insentif dan penalti sebagai pendorong kepatuhan.

Teori kepatuhan menurut Parker (2002 : 3-4), yaitu teori yang menjelaskan alasan dan cara individu atau organisasi mematuhi hukum, aturan, atau norma yang berlaku. Christine Parker mengidentifikasi dua pendekatan utama dalam teori ini, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan instrumental. Pendekatan normatif berfokus pada keyakinan bahwa aturan atau hukum dianggap adil, sah, dan sesuai dengan nilai moral. Orang atau organisasi cenderung mematuhi aturan karena mereka percaya bahwa otoritas yang menetapkan aturan tersebut memiliki legitimasi. Faktor seperti keadilan, transparansi, dan kesesuaian aturan dengan norma etika menjadi elemen penting dalam pendekatan ini. Sebaliknya, pendekatan instrumental memandang kepatuhan sebagai hasil dari pertimbangan rasional terhadap keuntungan dan risiko. Individu atau organisasi akan mematuhi aturan jika manfaat kepatuhan dianggap lebih besar daripada potensi kerugian, seperti

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



denda atau hukuman, dengan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada evaluasi untung-rugi secara rasional.

Dalam konteks perusahaan, Christine Parker menjelaskan bahwa kepatuhan sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari pemangku kepentingan, kebutuhan untuk menjaga legitimasi, serta keinginan untuk menghindari kerusakan reputasi. Perusahaan tidak hanya mematuhi hukum untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk membangun citra yang positif dan memperkuat hubungan baik dengan masyarakat. Kepatuhan menjadi lebih dari sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial yang bertujuan menjaga keberlanjutan operasional perusahaan di tengah harapan masyarakat yang terus berkembang.

b. Keterkaitan Teori Kepatuhan terhadap Kualitas *Carbon Emission Disclosure*

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana perusahaan didorong untuk mematuhi aturan atau regulasi, termasuk pengungkapan emisi karbon, melalui dua pendekatan utama: strategi pencegahan dan strategi kooperatif. Strategi pencegahan menekankan pengawasan ketat dan ancaman sanksi untuk menciptakan efek jera (*deterrence effect*), sehingga mendorong perusahaan memenuhi kewajiban pelaporan emisi karbon secara transparan. Sementara itu, strategi kooperatif berfokus pada dialog, persuasi, dan dukungan teknis dari regulator untuk membantu perusahaan memenuhi standar pelaporan emisi karbon secara efektif. Kombinasi antara penegakan hukum dan kolaborasi ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon (Scholz, 1984).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebaliknya, *carbon emission disclosure* memperkuat implementasi teori kepatuhan dengan menunjukkan transparansi dan komitmen perusahaan dalam mematuhi regulasi. Melalui pengungkapan ini, perusahaan membangun kepercayaan dengan regulator, pemangku kepentingan, dan masyarakat, yang sejalan dengan pendekatan kooperatif. Selain itu, perusahaan yang aktif melaporkan emisi karbon memberikan sinyal bahwa mereka bertanggung jawab secara lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko konflik regulasi, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di pasar.

3. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

a. Definisi Teori Pemangku Kepentingan

Freeman dan David (1983 : 88-89) menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan menyoroti tanggung jawab organisasi yang tidak hanya terbatas pada pemegang saham, tetapi juga mencakup berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam aktivitas perusahaan. Kelompok-kelompok ini, yang disebut pemangku kepentingan, meliputi karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, masyarakat, dan pihak lain yang mendukung keberlangsungan organisasi. Konsep ini berlandaskan pada gagasan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang memiliki "*stake*" atau kepentingan dalam keberlanjutan serta kesuksesan operasi mereka. Freeman membedakan pemangku kepentingan menjadi dua: definisi luas mencakup semua individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, sedangkan definisi sempit hanya mencakup pihak - pihak yang sangat bergantung pada organisasi, seperti karyawan dan pelanggan utama.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam praktik manajemen strategis, teori pemangku kepentingan digunakan untuk mengevaluasi dampak kelompok - kelompok ini dalam proses perencanaan strategis. Freeman menekankan pentingnya mengenali kebutuhan dan kepentingan setiap pemangku kepentingan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan strategi yang inklusif dan menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengelola hubungan dengan berbagai pihak secara lebih efektif, memastikan dukungan berkelanjutan dari para pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, teori ini memberikan kerangka kerja yang esensial bagi organisasi dalam memahami dan mengelola hubungan mereka dengan berbagai pihak yang relevan dalam operasional perusahaan.

Menurut Donaldson dan Preston (1995 : 3-5) teori *stakeholder* adalah konsep dalam etika bisnis yang menggambarkan korporasi sebagai konstelasi kepentingan kooperatif dan kompetitif yang memiliki nilai intrinsik. Semua orang atau kelompok dengan kepentingan yang sah berpartisipasi dalam suatu perusahaan untuk memperoleh manfaat, tanpa ada prioritas yang melekat pada satu set kepentingan dan manfaat atas yang lain. Berbeda dengan model *input-output* konvensional yang fokus pada aliran barang dan jasa, teori *stakeholder* ini bersifat deskriptif, instrumental, dan normatif. Teori ini berfungsi untuk menggambarkan korporasi, mengidentifikasi hubungan antara manajemen *stakeholder* dan tujuan perusahaan, serta menawarkan kerangka kerja normatif untuk mengevaluasi perilaku perusahaan.

Inti dari teori *stakeholder* adalah normatif, berdasarkan pada gagasan bahwa kepentingan semua *stakeholder* memiliki nilai intrinsik, yang penting

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

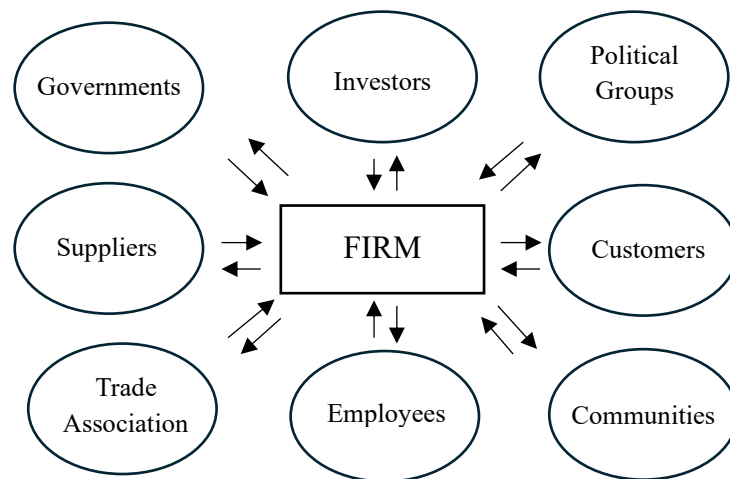
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

untuk legitimasi fungsi manajemen. Teori ini telah digunakan untuk menggambarkan bagaimana organisasi beroperasi, memprediksi perilaku organisasi, dan memandu struktur dan operasi perusahaan, serta mengidentifikasi hubungan antara manajemen *stakeholder* dan pencapaian tujuan perusahaan tradisional, seperti profitabilitas dan pertumbuhan. Meskipun dikritik karena tidak realistis, idealistis, dan tidak praktis, teori ini dipertahankan karena lebih akurat secara deskriptif, kuat secara instrumental, dan valid secara normatif. Dengan demikian, teori *stakeholder* menjadi kontribusi penting bagi bidang etika bisnis dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi perilaku perusahaan, serta menjadi alat yang berharga bagi manajer yang ingin meningkatkan kinerja organisasi mereka.

Gambar 2.2
Contrasting Models of the Corporation: The Stakeholder Model



Sumber: Donaldson dan Preston (1995)

Gambar 2.2 menggambarkan model pemangku kepentingan (*stakeholder model*) dari perusahaan, yang menunjukkan berbagai kelompok yang berinteraksi dengan sebuah perusahaan dan memengaruhi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



operasionalnya. Model ini menekankan bahwa sebuah perusahaan tidak hanya melayani pemegang sahamnya, tetapi juga bertanggung jawab kepada banyak pemangku kepentingan. Diagram ini mencakup pemerintah, investor, kelompok politik, pemasok, karyawan, pelanggan, asosiasi perdagangan, dan komunitas, yang semuanya terhubung dengan perusahaan, menggambarkan adanya pertukaran kepentingan dan tanggung jawab secara dinamis. Berbeda dengan model tradisional di mana *input* dan *output* hanya dipertukarkan antara perusahaan dan pelanggan, model pemangku kepentingan ini menyoroti saling ketergantungan, di mana perusahaan aktif berinteraksi dengan kelompok - kelompok ini dalam hubungan dua arah. Interaksi ini memengaruhi pengambilan keputusan, operasi, dan tujuan strategis dalam perusahaan. Model ini dengan demikian mewakili pandangan yang lebih luas dan inklusif tentang tanggung jawab perusahaan (Donaldson dan Preston, 1995).

b. Keterkaitan Teori Pemangku Kepentingan terhadap Kualitas *Carbon*

Emission Disclosure

Pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh tuntutan para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian besar terhadap isu lingkungan, seperti perubahan iklim. *Stakeholder theory* dalam konteks ini menjelaskan bahwa perusahaan perlu memberikan transparansi dalam bentuk laporan keberlanjutan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap dampak lingkungan. Laporan ini menjadi sarana komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan dan mengurangi ketidakseimbangan informasi. Dengan demikian, pengungkapan emisi karbon tidak hanya menjadi alat pelaporan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetapi juga sarana untuk memenuhi harapan *stakeholder* terhadap praktik keberlanjutan perusahaan (Ovina dan Meiden, 2023).

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk masyarakat, karyawan, pelanggan, dan investor. Dalam konteks *carbon emission disclosure* (CED), pengungkapan emisi karbon menjadi wujud transparansi perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan sekaligus memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Dengan menyediakan informasi yang relevan mengenai emisi karbon, perusahaan tidak hanya memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan tetapi juga meningkatkan reputasi serta legitimasi sosial. Selain itu, langkah ini membantu perusahaan memenuhi tuntutan regulasi lingkungan dan memitigasi risiko konflik dengan masyarakat atau pihak berwenang, sehingga pengungkapan emisi karbon berperan strategis dalam mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan (Mawarti dan Murwaningsari, 2024).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

a. Definisi Teori Legitimasi

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975 : 122) teori legitimasi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai - nilai sosial yang berkaitan dengan aktivitas mereka dan norma - norma perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih luas. Ketika nilai-nilai organisasi dan norma sosial selaras, legitimasi organisasi dapat tercapai. Namun, jika terjadi ketidaksesuaian antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

keduanya, legitimasi organisasi dapat terancam, yang berpotensi memunculkan sanksi dalam bentuk hukum, ekonomi, atau sosial.

Teori ini juga menekankan upaya organisasi untuk meningkatkan persepsi legitimasi melalui proses legitimasi. Proses ini melibatkan langkah - langkah yang dilakukan organisasi untuk menyesuaikan aktivitas mereka agar sesuai dengan norma sosial, atau untuk memengaruhi cara masyarakat memandang aktivitas mereka. Teori legitimasi menyediakan kerangka analitis untuk memahami perilaku organisasi dalam kaitannya dengan lingkungannya, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan atau memperkuat legitimasi mereka.

Menurut Suchman (1995 : 574) teori legitimasi menjelaskan bahwa legitimasi adalah persepsi atau anggapan umum bahwa tindakan suatu organisasi dianggap sesuai, layak, dan diterima berdasarkan norma, nilai, keyakinan, serta definisi yang berlaku di masyarakat. Legitimasi tidak hanya bergantung pada satu tindakan spesifik, melainkan mencakup cara organisasi dipandang secara keseluruhan dalam hubungannya dengan standar sosial yang berlaku. Legitimasi bersifat luas (*generalized*), artinya tidak terikat pada satu peristiwa tertentu, melainkan mencerminkan penilaian menyeluruh terhadap organisasi. Bahkan, penyimpangan organisasi dari norma sosial tetap memungkinkan mereka mempertahankan legitimasi selama penyimpangan tersebut dianggap tidak signifikan atau tidak disadari oleh masyarakat.

Selain itu, teori legitimasi menyoroti bahwa legitimasi bersifat sosial, karena didasarkan pada kesesuaian antara perilaku organisasi dengan nilai - nilai bersama yang diterima masyarakat. Namun, legitimasi juga bersifat

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





subjektif, karena bergantung pada persepsi individu atau kelompok terhadap organisasi tersebut. Secara garis besar, teori legitimasi menggambarkan bagaimana organisasi dapat memperoleh penerimaan atau dukungan dari masyarakat melalui tindakan yang selaras dengan harapan sosial. Jika terjadi ketidaksesuaian, legitimasi dapat terganggu dan berisiko menimbulkan dampak negatif bagi organisasi.

Gambar 2.3
A Typology of Legitimacy

	Actions	Essences	
Episodic Continual	Exchange Influence	Disposition Interest Character	Pragmatic Legitimacy
Episodic Continual	Consequential Procedural	Personal Structural	Moral Legitimacy
Episodic Continual	Predictability Inevitability	Plausibility Permanence	Cognitive Legitimacy

Sumber: Suchman (1995)

Gambar 2.3 menunjukkan *Typology of Legitimacy* yang mengkategorikan berbagai jenis legitimasi dalam sebuah matriks berdasarkan dua dimensi: aksi dan esensi. Aksi dibagi menjadi dua kategori : episodik (berkaitan dengan pertukaran atau pengaruh) dan kontinu (berkaitan dengan konsekuensi atau prosedur). Esensi dibagi menjadi disposisi (menyentuh karakter atau minat), personal atau struktural, serta yang lebih bersifat rasional seperti prediktabilitas atau ketidakberdayaan. Legitimasi ini dibagi dalam tiga jenis besar : pragmatik, moral, dan kognitif, masing-masing

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan fokus pada pengaruh yang dapat diterima secara praktis, norma etika, dan pengetahuan yang dianggap benar (Suchman, 1995).

Teori legitimasi menurut Deegan (2002 : 292) menyoroti hubungan antara organisasi dan sistem sosial yang lebih luas, di mana legitimasi diartikan sebagai persepsi atau anggapan bahwa tindakan organisasi sejalan dengan norma, nilai, keyakinan, dan aturan yang diterima oleh masyarakat. Teori ini menempatkan legitimasi sebagai elemen kunci yang mendukung keberlanjutan organisasi dengan memastikan kesesuaiannya terhadap harapan sosial.

Deegan juga menggarisbawahi bahwa teori legitimasi merupakan bagian dari pendekatan ekonomi politik, yang menekankan keterkaitan erat antara aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kerangka ini, organisasi tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terkait perilaku yang sesuai. Melalui teori legitimasi, organisasi dapat mengadaptasi strategi pengungkapan mereka untuk mengikuti perubahan norma dan nilai sosial, sehingga mampu menjaga atau meningkatkan legitimasi mereka di mata masyarakat.

b. Keterkaitan Teori Legitimasi terhadap Kualitas *Carbon Emission Disclosure*

Teori legitimasi menjadi dasar penting dalam pengungkapan emisi karbon. Perusahaan menggunakan laporan emisi karbon sebagai bentuk komitmen untuk menunjukkan bahwa aktivitas operasional mereka selaras dengan norma dan nilai sosial masyarakat. Dengan melaporkan emisi karbon, perusahaan berupaya menjaga keberlanjutan dengan membangun citra positif di mata masyarakat dan pemangku kepentingan. Tindakan ini bertujuan untuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperkuat legitimasi perusahaan di tengah tekanan sosial yang semakin besar terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan (Ladista et al., 2023).

Teori legitimasi berhubungan erat dengan upaya perusahaan mendapatkan pengakuan sosial melalui pengungkapan emisi karbon. Dalam konteks ini, pengungkapan dilakukan sebagai tanggapan terhadap tekanan masyarakat dan regulasi terkait perubahan iklim. Perusahaan yang mematuhi harapan sosial, seperti melaporkan emisi karbon, cenderung lebih mudah mendapatkan dukungan publik dan membangun reputasi positif. Dukungan ini penting bagi keberlanjutan perusahaan, khususnya untuk mengurangi risiko penolakan dari masyarakat atau sanksi akibat pelanggaran norma lingkungan (Indah Sukmawati dan Deliza Henny, 2024).

Carbon Emission Disclosure

Carbon Emission Disclosure (CED) atau pengungkapan emisi karbon adalah proses pelaporan informasi terkait emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Pelaporan ini mencakup data tentang intensitas emisi karbon, kebijakan pengelolaan lingkungan, langkah mitigasi perubahan iklim, serta strategi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurut Muhammad dan Aryani (2021), CED tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana transparansi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan terkait tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan.

Pengungkapan emisi karbon biasanya disajikan melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*) atau laporan tahunan (*annual report*) dengan mengacu pada standar pelaporan seperti *Global Reporting Initiative* (GRI), CDP

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*Carbon Disclosure Project*), atau standar nasional lainnya. Hal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan dampak emisi karbon mereka kepada pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan (Sandy & Ardiana, 2023).

Teori agensi menjelaskan konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen), di mana sering terjadi asimetri informasi. Dalam konteks CED, pengungkapan emisi karbon membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga meningkatkan transparansi. Muhammad dan Aryani (2021) menyatakan bahwa pengungkapan ini tidak hanya memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan bahwa perusahaan menjalankan praktik keberlanjutan yang bertanggung jawab.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menyoroti bagaimana perusahaan dapat didorong untuk mematuhi aturan atau regulasi melalui kombinasi pendekatan strategis, seperti strategi pencegahan (*deterrence*) dan strategi kooperatif (*cooperative*). Strategi pencegahan melibatkan pengawasan ketat dan ancaman sanksi bagi ketidakpatuhan, sementara strategi kooperatif berfokus pada dialog dan kolaborasi antara regulator dan perusahaan. Scholz (1984) menunjukkan bahwa kombinasi kedua strategi ini efektif dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan harapan dan kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat, untuk menjaga hubungan yang baik dan memperoleh legitimasi. Dalam konteks pengungkapan emisi karbon,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan perlu transparan tentang dampak lingkungan dari operasional mereka untuk menjaga hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan dan memenuhi tuntutan akan tanggung jawab sosial. Menurut Rahmadhani dan Indriyani (2019), perusahaan yang beroperasi dalam industri yang menghasilkan emisi tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon. Hal ini tidak hanya memenuhi tuntutan pasar tetapi juga sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi sosial dan meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Teori legitimasi berpendapat bahwa perusahaan harus menyesuaikan perilakunya dengan norma, nilai, dan harapan masyarakat agar dapat mempertahankan keberadaannya. Dalam konteks CED, pengungkapan informasi terkait emisi karbon menjadi salah satu cara perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Amanda Oktariyani (2024) menjelaskan bahwa melalui CED, perusahaan berupaya memperkuat citra positif di mata masyarakat, memenuhi ekspektasi sosial, dan mengurangi risiko penolakan dari pemangku kepentingan akibat isu lingkungan.

Pengungkapan emisi karbon memiliki manfaat yang signifikan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, CED membantu perusahaan mengidentifikasi area operasional yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon, sehingga mempermudah perancangan strategi mitigasi yang efektif. Secara eksternal, CED membangun kepercayaan masyarakat, menarik investor yang peduli terhadap keberlanjutan, dan memenuhi tuntutan regulasi lingkungan (Lasmiati et al., 2024).

Dalam pengungkapan emisi karbon ini terdapat juga kualitas *carbon emission disclosure*. Kualitas *carbon emission disclosure* pada penelitian ini dijadikan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai alat untuk pemeringkatan nilai CED, nilai CED ini didapat dengan cara melakukan metode konten analisis isi. Metode konten analisis isi dilakukan dengan cara, yaitu peneliti melakukan penelitian mendalam pada *sustainability report* dari 15 perusahaan yang sudah terpilih untuk di teliti. Kemudian peneliti melakukan penilaian atas pengungkapan GRI 305: *Emissions* dari ke-15 perusahaan tersebut dengan metode kuantitatif dan juga kualitatif, untuk kuantitatif yaitu skor maksimalnya adalah lima dan untuk kualitatif yaitu skor maksimalnya adalah delapan. Setelah melakukan penilaian terhadap ketujuh item GRI 305: *Emissions*, selanjutnya peneliti membuat tabel hasil scoring kuantitatif dan kualitatif untuk sektor pertambangan dan maskapai penerbangan secara terpisah.

Dalam tabel hasil scoring ini berisikan total skor pengungkapan GRI 305 secara keseluruhan per emiten per tahun, dan juga rata rata skor dari setiap item GRI 305 per tahun baik untuk kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya peneliti membuat tabel analisis untuk masing masing sektor. Tabel analisis ini berisikan tabel rata rata skor per item per tahun untuk metode kuantitatif dan kualitatif, tabel rata rata skor per emiten per tahun untuk metode kuantitatif dan kualitatif.

Selanjutnya peneliti membuat tabel tingkat kualitas dari kedua sektor secara terpisah. Pertama-tama peneliti membuat tabel tingkat kualitas untuk metode kuantitatif dengan membagi jumlah skor 4 tahun per emiten dibagi dengan skor maksimal GRI 305 yang kemudian menghasilkan persentase kepatuhan. Kemudian peneliti menghitung interval kelas untuk menentukan tingkat kualitas dari setiap emiten secara kuantitatif. Hal serupa dilakukan untuk menghitung tingkat kualitas dengan metode kualitatif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemudian setelah peneliti sudah mendapatkan tingkat kualitas untuk metode kuantitatif dan kualitatif, kemudian peneliti menggabungkan nilai kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan nilai *carbon emission disclosure* untuk setiap perusahaan secara menyeluruh. Peneliti menggabungkan kedua nilai tersebut dengan cara memberi peringkat untuk metode kuantitatif dan juga metode kualitatif, memberikan peringkat dengan kriteria semakin besar nilai maka semakin baik. Setelah itu peneliti menyatukan kedua peringkat tersebut dengan rumus pitagoras yang kemudian menghasilkan nilai *carbon emission disclosure* gabungan, dan nilai inilah yang disebut CED dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan nilai gabungan ini, peneliti memberikan peringkat lagi dengan kriteria semakin kecil maka semakin tinggi peringkatnya. Peringkat tertinggi adalah perusahaan yang paling baik kualitasnya dalam mengungkapkan emisi karbon. Pemingkatan dari nilai CED inilah yang disebut sebagai kualitas *carbon emission disclosure*.

Setelah mendapatkan tingkat kualitas dalam bentuk persentase, peringkat per metode, peringkat setelah penggabungan, dan juga tingkat kualitas dalam range rendah, sedang dan tinggi. Kemudian peneliti membuat tabel kontigensi untuk mengelompokkan perusahaan sesuai dengan rendah, sedang, dan tinggi secara kuantitatif dan kualitatif.

Beberapa standar internasional yang digunakan untuk pengungkapan emisi karbon meliputi:

a. *Global Reporting Initiative* (GRI)

GRI adalah organisasi internasional independen yang sejak tahun 1997 telah menjadi pelopor dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan. Misi GRI adalah memberikan dukungan kepada para pengambil keputusan di

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



seluruh dunia melalui standar dan jaringan pemangku kepentingannya, guna mendorong tindakan menuju terciptanya ekonomi dan dunia yang lebih berkelanjutan (CDP dan GRI, 2017).

Standar pelaporan keberlanjutan GRI (*GRI Standards*) adalah seperangkat standar modular yang dirancang untuk membantu organisasi mana pun melaporkan dampak mereka terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar ini mencakup tiga standar universal yang berlaku untuk semua organisasi, yaitu GRI 101: Landasan, GRI 102: Pengungkapan Umum, dan GRI 103: Pendekatan Manajemen. Selain itu, terdapat 33 standar topik khusus yang terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Organisasi dapat memilih standar topik yang relevan untuk melaporkan isu-isu material yang signifikan bagi mereka (CDP & GRI, 2017).

Standar GRI dirancang agar dapat digunakan dengan berbagai format pelaporan yang berbeda dan telah disesuaikan dengan kerangka kerja internasional yang diakui, termasuk permintaan informasi dari CDP, yang menjadi referensi dalam standar terkait. CDP secara aktif berpartisipasi dalam revisi pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) pada standar GRI untuk memastikan kedua kerangka pelaporan memiliki keselarasan yang kuat. Keselarasan ini dicapai karena keduanya secara signifikan mengacu pada *Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard* dan *Scope 3 (Value Chain) Standard* yang dikembangkan oleh *World Resources Institute (WRI)* dan *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* (CDP dan GRI, 2017).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam indeks GRI, bagian yang berisi pengungkapan emisi karbon yaitu GRI 305: *Emissions*. Berikut penjelasan mengenai GRI 305: *Emissions*:

(1) GRI 305: *Emissions*

GRI 305: Emisi 2016 menyediakan panduan bagi organisasi untuk mengungkapkan informasi terkait dampak yang dihasilkan dari emisi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengelola dampak tersebut. Standar ini membahas emisi ke atmosfer, yaitu pelepasan berbagai zat dari sumbernya ke udara. Jenis emisi yang dicakup meliputi : kompensasi atau tunjangan emisi, zat perusak lapisan ozon (ODS), serta nitrogen oksida (NO_x) dan belerang oksida (SO_x), yang termasuk dalam kategori emisi udara yang signifikan (GRI 305, 2016).

Emisi gas rumah kaca (GRK) adalah penyumbang utama perubahan iklim dan diatur oleh Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB serta Protokol Kyoto. Jenis GRK yang dilaporkan meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrogen oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), sulfur heksafluorida (SF₆), dan nitrogen trifluorida (NF₃). Beberapa di antaranya, seperti metana, memiliki dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan ekosistem. Untuk mengelola emisi ini, diterapkan berbagai regulasi dan sistem insentif, seperti perdagangan emisi dan penghargaan atas pengurangan GRK (GRI 305, 2016).

Pelaporan emisi GRK mengacu pada standar pelaporan dan akuntansi protokol GRK serta standar nilai rantai perusahaan protokol GRK yang dikembangkan oleh *World Resources Institute* (WRI) dan *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD). Standar ini membagi

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



emisi GRK ke dalam tiga kategori: lingkup 1 untuk emisi langsung, lingkup 2 untuk emisi tidak langsung dari konsumsi energi, dan Lingkup 3 untuk emisi tidak langsung lainnya dari rantai nilai. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi organisasi dalam melaporkan dan mengelola emisi GRK secara terstruktur (GRI 305, 2016).

GRI 305: *Emissions* terdiri dari 7 item pengungkapan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuh item Pungungkapan GRI 305

GRI 305	Keterangan Pengungkapan
305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
305-2	Emisi Energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
305-4	Intensitas emisi GRK
305-5	Pengurangan emisi GRK
305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
305-7	Nitrogen oksida (NO _x), belerang oksida (SO _x), dan emisi udara signifikan lainnya

Sumber: GRI 305 (2016) dan diolah kembali oleh peneliti

Berdasarkan tabel 2.1, berikut penjelasan untuk setiap item GRI 305

(a) 305-1 (Emisi GRK (Cakupan 1) langsung)

Pengungkapan ini mencakup emisi gas rumah kaca (GRK) langsung yang berasal dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. Perusahaan harus melaporkan total emisi dalam metrik ton setara CO₂, termasuk jenis gas yang dihitung seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O). Selain itu, metode perhitungan yang digunakan, faktor emisi, serta pendekatan konsolidasi juga harus diungkapkan.

(b) 305-2 (Emisi Energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung)

Pengungkapan ini mencakup emisi GRK yang berasal dari konsumsi energi tidak langsung, seperti listrik, pemanasan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendinginan, atau uap yang dibeli dari pihak lain. Perusahaan harus melaporkan emisi berdasarkan metode berbasis lokasi dan berbasis pasar untuk meningkatkan transparansi. Faktor emisi dan standar penghitungan yang digunakan juga perlu dijelaskan.

(c) 305-3 (Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya)

Emisi GRK tidak langsung lainnya berasal dari aktivitas di luar kendali langsung organisasi, seperti pengangkutan bahan baku, penggunaan produk, atau perjalanan bisnis karyawan. Perusahaan harus melaporkan kategori emisi ini, termasuk emisi dari aktivitas hulu dan hilir dalam rantai nilai mereka. Standar perhitungan dan metodologi yang digunakan juga harus disebutkan.

(d) 305-4 (Intensitas emisi GRK)

Intensitas emisi mengukur efisiensi organisasi dalam mengelola emisi GRK dibandingkan dengan metrik tertentu, seperti pendapatan, produksi, atau jumlah karyawan. Perusahaan harus melaporkan perhitungan intensitas emisi dengan membagi total emisi dengan unit bisnis yang relevan untuk memungkinkan perbandingan dan evaluasi kinerja keberlanjutan.

(e) 305-5 (Pengurangan emisi GRK)

Pengungkapan ini melaporkan pengurangan emisi yang dihasilkan dari inisiatif perusahaan, seperti peralihan ke energi terbarukan, efisiensi energi, atau perubahan proses produksi. Perusahaan harus menjelaskan metode pengurangan yang digunakan, total emisi yang dikurangi dalam metrik ton CO₂, serta cakupan (1, 2, atau 3) tempat pengurangan terjadi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(f) 305-6 (Emisi zat perusak ozon (ODS))

Laporan ini mencakup produksi, impor, dan ekspor zat - zat yang dapat merusak lapisan ozon, seperti klorofluorokarbon (CFC) dan hidroklorofluorokarbon (HCFC). Perusahaan harus melaporkan volume zat ini dalam setara triklorofluorometana (CFC-11) serta faktor emisi dan metode perhitungan yang digunakan.

(g) 305-7 (Nitrogen oksida (NO_x), belerang oksida (SO_x), dan emisi udara signifikan lainnya)

Pengungkapan ini mencakup emisi polutan udara lainnya yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan, seperti nitrogen oksida (NO_x), belerang oksida (SO_x), senyawa organik yang mudah menguap (VOC), dan materi partikulat (PM). Perusahaan harus melaporkan jumlah emisi dalam kilogram atau satuan lainnya serta metode perhitungan yang digunakan.

b. TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) adalah sebuah satuan tugas yang dibentuk oleh *Financial Stability Board* (FSB) untuk mengembangkan rekomendasi pengungkapan keuangan terkait iklim secara sukarela. Kerangka kerja TCFD bertujuan untuk membantu perusahaan memberikan informasi yang konsisten dan sebanding tentang risiko dan peluang terkait iklim kepada investor, pemberi pinjaman, dan pemangku kepentingan lainnya. Elemen inti dari rekomendasi TCFD dibangun di sekitar empat bidang utama : tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan metrik serta target (TCFD, 2019).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Rekomendasi TCFD dirancang agar relevan untuk semua organisasi, terlepas dari ukuran, sektor, atau lokasinya. Rekomendasi ini juga dirancang agar fleksibel, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pengungkapan mereka dengan keadaan khusus mereka. Kerangka kerja TCFD menekankan pentingnya analisis skenario untuk menilai potensi dampak perubahan iklim terhadap bisnis, strategi, dan perencanaan keuangan perusahaan. TCFD mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan berbagai skenario terkait iklim, termasuk skenario 2°C atau lebih rendah, untuk memahami ketahanan bisnis mereka di bawah berbagai kemungkinan masa depan terkait iklim (Demers et al., 2024).

TCFD telah mendapatkan daya tarik yang signifikan secara global, dengan dukungan dari berbagai organisasi, termasuk investor, perusahaan, dan pemerintah. Rekomendasi TCFD semakin diakui sebagai kerangka kerja terkemuka untuk pelaporan keuangan terkait iklim. Banyak perusahaan menggunakan rekomendasi TCFD untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko dan peluang terkait iklim dan untuk mengomunikasikan informasi ini kepada para pemangku kepentingan mereka.

c. SASB

SASB *Standard* atau *Sustainability Accounting Standards Board* adalah standar pelaporan keberlanjutan yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko dan peluang keberlanjutan yang relevan dengan industri mereka. Tidak seperti kerangka kerja pelaporan keberlanjutan umum lainnya, SASB *Standard* memberikan panduan khusus industri dan berfokus pada informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan investor

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(<https://www.sasb.org/about-sasb/>). Standar ini dikembangkan oleh *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), sebuah organisasi nirlaba independen yang berdedikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal kinerja keberlanjutan.

Kerangka kerja SASB *Standard* didasarkan pada dimensi keberlanjutan, industri, dan topik materialitas. Dimensi keberlanjutan mencakup lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). SASB *Standard* mengklasifikasikan industri ke dalam 77 sektor yang berbeda, masing-masing dengan topik materialitas yang spesifik. Topik materialitas adalah isu-isu keberlanjutan yang penting karena dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan atau keputusan investor. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko dan peluang keberlanjutan yang paling relevan dengan industri dan bisnis mereka. Misalnya, perusahaan di industri pertambangan akan fokus pada topik-topik seperti pengelolaan air, emisi gas rumah kaca, dan kesehatan dan keselamatan kerja.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Aliran Akuntansi Dunia (*World Accounting Classification*)

Menurut Nobes, Douppnik dan Perera (2018) aliran akuntansi dunia dikelompokkan menjadi 5 aliran yaitu :

a. Aliran *Anglo-Saxon*

Istilah *Anglo-Saxon* mengacu pada sekelompok negara yang meliputi Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Meskipun sistem akuntansi di negara - negara tersebut tidak identik, mereka memiliki beberapa kesamaan mendasar yang membedakan mereka dari sistem akuntansi lainnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Fokus pada bagaimana bisnis beroperasi di tingkat perusahaan (orientasi mikro), dengan penekanan pada pentingnya penilaian profesional (pengakuan aturan profesional dan pengaturan diri profesional).
- (2) Orientasi investor, dengan penyediaan informasi untuk operasi pasar modal yang efisien sebagai tujuan utama (pengakuan pentingnya transparansi).
- (3) Kurang menekankan pada kehati-hatian dan pengukuran penghasilan kena pajak atau pendapatan yang dapat dibagikan, dan keinginan untuk melampaui bentuk hukum superfisial (substansi di atas bentuk).

b. Aliran Asia Timur

Akuntansi Asia Timur didominasi oleh dua negara dengan perekonomian terbesar di wilayah tersebut, yaitu Tiongkok dan Jepang. Kedua negara tersebut memiliki sejarah panjang dalam kontrol terpusat dan sistem hukum komersial yang dikodifikasikan. Namun, keduanya telah dipengaruhi oleh gagasan *Anglo-Saxon*, termasuk konvergensi aturan akuntansi baru - baru ini dengan IFRS (*International Financial Reporting Standards*), setidaknya untuk perusahaan publik.

- (1) Pemerintah adalah pengaruh utama dalam lingkungan pelaporan keuangan di Jepang. Terdapat tiga sumber yang berbeda, yaitu Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Sekuritas, dan Peraturan Perpajakan. Ketiga sumber tersebut mewakili sikap yang berbeda terhadap tujuan laporan keuangan.
- (2) Pelaporan keuangan di Tiongkok telah berubah sebagai hasil dari reformasi ekonomi. Akuntansi *Anglo-Saxon* telah berpengaruh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Aliran Eropa Kontinental

Model Eropa Kontinental mengacu pada pendekatan yang digunakan di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Model ini dicirikan oleh fokus pada kepatuhan hukum dan peraturan, serta penyediaan informasi untuk tujuan perpajakan dan perencanaan pemerintah.

- (1) Akuntansi di negara-negara ini biasanya terkait erat dengan bank yang bertindak sebagai pemasok utama pembiayaan.
- (2) Karena negara-negara tersebut merupakan negara - negara hukum kode, akuntansi bersifat legalistik dan dirancang untuk menyediakan informasi untuk tujuan perpajakan atau perencanaan pemerintah.
- (3) Pengaruh perpajakan pada pelaporan keuangan sangat terlihat dalam model ini.

d. Aliran Amerika Latin

Model Amerika Latin mirip dengan Model Eropa Kontinental dalam orientasi hukum, pajak, dan perencanaan pemerintahnya. Namun, model ini membedakan dirinya melalui penggunaan penyesuaian inflasi secara ekstensif.

- (1) Model ini terutama digunakan di Amerika Selatan, yang secara historis mengalami tingkat inflasi yang tinggi.
- (2) Meskipun inflasi telah dikendalikan di sebagian besar negara Amerika Selatan, penyesuaian inflasi tetap menjadi fitur penting dari sistem akuntansi mereka.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Aliran Komunis

Akuntansi Komunis adalah sistem akuntansi yang digunakan di negara - negara komunis, seperti Uni Soviet dan Tiongkok sebelum reformasi ekonomi. Sistem ini dicirikan oleh fokus pada perencanaan terpusat dan kontrol negara atas kegiatan ekonomi.

- (1) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi pemerintah untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, bukan untuk pengambilan keputusan oleh investor dan kreditor.
- (2) Akuntansi dipandang sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan kegiatan ekonomi, bukan sebagai alat untuk pengambilan keputusan ekonomi.
- (3) Dengan runtuhnya komunisme di Eropa Timur dan reformasi ekonomi di Tiongkok, sistem akuntansi komunis telah ditinggalkan oleh sebagian besar negara. Namun, beberapa elemen sistem ini mungkin masih ada di beberapa negara.

Tabel 2.2
List Emiten Sampel

No	Emiten Sektor	Anglo Saxon	Asia Timur	Latin	TOTAL
1	<p><i>Airlines</i></p> <p>1. Singapore Airlines Ltd. Top Institutional Holders : Temasek Holdings (Private) Limited Mayoritas : Other Institutional Investors Country : Singapore Capital Market : SGX</p> <p>2. EVA Airways Corp. Top Institutional Holders : Capital Investment Trust Corporation</p>	2	3	2	7

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	<p>Mayoritas : Public Companies & Retail Investors Country : Taiwan Capital Market : TWSE</p> <p>3. Korean Airlines Co.,Ltd. Top Institutional Holders : Hanjin Kal Mayoritas : Other Institutional Investors Country : Korea Selatan Capital Market : KRX</p> <p>4. Cathay Pacific Airways Limited Top Institutional Holders : John Swire & Sons Limited Mayoritas : Other Institutional Investors Country : Hongkong Capital Market : HKEX</p> <p>5. Southwest Airlines Co. Top Institutional Holders : The Vanguard Group, Inc. Mayoritas : Mutual Funds & ETFs Country : Amerika Serikat Capital Market : NYSE</p> <p>6. Aeromexico Mayoritas : Tidak diungkap Country : Meksiko Capital Market : BMV</p> <p>7. Azul Brazilian Airlines Top Institutional Holders :JPMorgan Chase & Co Mayoritas : Other Institutional Investors Country : Brasil Capital Market : NYSE</p>				
2	<p>Mining</p> <p>1. Keppel Offshore & Marine Top Institutional Holders : Temasek Holdings (Private) Limited Mayoritas : Public Companies & Retail Investors Country : Singapore Capital Market : SGX</p>	3	2	3	8



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p>2. CPC Corporation Taiwan Mayoritas : Milik Negara Country : Tiawan Capital Market : -</p> <p>3. SK Innovation Top Institutional Holders : Hanjin Kal Mayoritas : Other Institutional Investors Country : Korea Selatan Capital Market : KRX</p> <p>4. Halliburton Top Institutional Holders : The Vanguard Group, Inc. Mayoritas : Mutual Funds & ETFs Country : Amerika Serikat Capital Market : NYSE</p> <p>5. YPF (Yacimientos Petroliferos Fiscales) Top Institutional Holders : Argentina Mayoritas : Other Institutional Investors Country : Meksiko Capital Market : NYSE</p> <p>6. Petroleos Mexicanos (PEMEX) Mayoritas : Milik Negara Country : Meksiko Capital Market : -</p> <p>7. Suncor Energy Top Institutional Holders : The Vanguard Group, Inc. Mayoritas : Mutual Funds & ETFs Country : Canada Capital Market : TSX</p> <p>8. Petrobras Top Institutional Holders : Brazil Mayoritas : Other Institutional Investors Country : Brasil Capital Market : NYSE</p>				
---	--	--	--	--

Sumber: <https://www.investing.com> dan <https://finance.yahoo.com> dan diolah kembali oleh peneliti (2024)



7. Laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Menurut CDP dan GRI (2017) *Sustainability Report* adalah media komunikasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya, sekaligus menunjukkan upaya perusahaan dalam mengelola dampak tersebut secara bertanggung jawab. Pengungkapan ini dirancang untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan karyawan, mengenai strategi dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Menurut Aditya Setiani dan Sinaga (2021) *sustainability report* adalah laporan keberlanjutan yang mencakup kinerja perusahaan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini mengubah paradigma para pelaku bisnis, di mana perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memberikan perhatian pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang sering kali dikaitkan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Sustainability Report (SR) adalah laporan yang mencakup tiga pilar utama, yaitu ekonomi (*Profit*), sosial (*People*), dan lingkungan (*Planet*), yang sering disebut sebagai *Triple Bottom Line*. Laporan ini disusun untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan mengenai dampak operasional perusahaan dalam mendukung keberlanjutan (Timothy F. Slaper, 1999).

Selain mencakup tiga pilar utama, *sustainability report* juga mengacu pada standar umum yang mencakup informasi dasar dan manajerial perusahaan, diikuti dengan standar khusus untuk masing-masing pilar. Standar ini dipandu oleh

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Global Reporting Initiative (GRI) sebagai acuan internasional dalam pelaporan keberlanjutan (de Villiers et al., 2022).

Sustainability report atau laporan keberlanjutan berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) terdiri dari struktur standar yang mencakup standar umum dan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Standar umum (*General Standards* - GRI 100) memberikan konteks dasar tentang organisasi dan laporan keberlanjutan yang dibuat. Standar ini meliputi GRI 101: *Foundation*, yang menjelaskan prinsip dasar pelaporan keberlanjutan seperti transparansi, keseimbangan, dan kejelasan; GRI 102: *General Disclosures*, yang berisi informasi tentang profil organisasi, strategi, tata kelola, etika, integritas, dan manajemen pemangku kepentingan; serta GRI 103: *Management Approach*, yang menguraikan pendekatan manajemen terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pilar Ekonomi (*Economic Standards* - GRI 200) berfokus pada dampak ekonomi perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat. Pilar ini meliputi GRI 201: *Economic Performance*, yang mencakup informasi tentang pencapaian keuangan perusahaan; GRI 202: *Market Presence*, yang memberikan data tentang upah karyawan dibandingkan dengan standar lokal; GRI 203: *Indirect Economic Impacts*, yang berisi dampak ekonomi tidak langsung seperti kontribusi terhadap masyarakat; dan GRI 204: *Procurement Practices*, yang mencakup kebijakan pengadaan barang dan jasa.

Pilar Lingkungan (*Environmental Standards* - GRI 300) mengukur dampak perusahaan terhadap lingkungan, dengan standar yang meliputi GRI 301: *Materials*, yang memberikan informasi tentang penggunaan bahan baku; GRI 302: *Energy*, yang memuat data tentang konsumsi energi perusahaan termasuk

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



energi terbarukan; GRI 303: *Water and Effluents*, yang menjelaskan penggunaan dan pengelolaan air; GRI 305: *Emissions*, yang berisi data tentang emisi gas rumah kaca (GRK); serta GRI 306: *Waste*, yang membahas pengelolaan limbah dan daur ulang.

Pilar Sosial (*Social Standards* - GRI 400) membahas dampak sosial dari operasi perusahaan. Standar ini meliputi GRI 401: *Employment*, yang mencakup kebijakan tentang tenaga kerja seperti perekrutan dan kesejahteraan karyawan; GRI 403: *Occupational Health and Safety*, yang berfokus pada kesehatan dan keselamatan kerja; GRI 404: *Training and Education*, yang menguraikan pelatihan dan pengembangan karyawan; GRI 405: *Diversity and Equal Opportunity*, yang membahas kesetaraan dan keberagaman di tempat kerja; serta GRI 413: *Local Communities*, yang menjelaskan interaksi dan dampak perusahaan terhadap komunitas lokal.

Carbon Emission Disclosure (CED) masuk ke dalam pilar lingkungan melalui standar GRI 305: *Emissions*. Pengungkapan emisi karbon bertujuan untuk memberikan informasi transparan mengenai jejak karbon perusahaan, mencakup emisi langsung, emisi tidak langsung dari energi, serta emisi lainnya yang relevan dengan aktivitas operasional perusahaan. Hal ini membantu perusahaan untuk menunjukkan upaya mereka dalam mengelola dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Rahmadhani dan Rahayu Indriyani (2019) mengenai *Impact of Emissions Intensive Industries and Financial Distress on Voluntary Carbon Emission Disclosure*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa industri dengan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



emisi tinggi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon sukarela, sementara kondisi keuangan yang tertekan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pengungkapan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh V. Herawaty dan Veronica Pernanda P (2020) mengenai *Carbon Emission Disclosure, Competition and Company's Characteristics*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan kompetisi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon (CED), sementara usia perusahaan, tipe industri, dan kinerja lingkungan tidak mempengaruhi pengungkapan tersebut. Kompetisi memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap CED, tetapi tidak memoderasi pengaruh faktor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Gazani Izmar Muhammad dan Y. Anni Aryani (2021) mengenai *The Impact of Carbon Disclosure on Firm Value with Foreign Ownership as A Moderating Variable*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan karbon berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, namun kepemilikan asing dapat memoderasi hubungan tersebut, mengurangi dampak negatif pengungkapan karbon terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh De Villiers, C., La Torre, M., & Molinari, M. (2022) mengenai Peran *Global Reporting Initiative (GRI)* dalam Pelaporan Keberlanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GRI memiliki peran penting dalam menyelaraskan standar pelaporan keberlanjutan dengan berbagai pendekatan lain, termasuk *International Sustainability Standards Board (ISSB)*, untuk menciptakan panduan pelaporan yang lebih harmonis.

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Oktariyani (2024) mengenai Analisis Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Keberlanjutan



C. Kerangka Pemikiran

C CED (*Carbon Emissions Disclosure*)

Pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emissions Disclosure* atau CED) adalah proses pelaporan informasi terkait emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Pelaporan ini mencakup data tentang intensitas emisi karbon, kebijakan pengelolaan lingkungan, langkah mitigasi perubahan iklim, serta strategi untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan (Ladista et al., 2023). Dalam konteks penelitian ini, CED didefinisikan melalui tiga item utama dalam standar GRI 305: *Emissions*, yaitu *Scope 1* (emisi langsung), *Scope 2* (emisi tidak langsung dari konsumsi energi), dan *Scope 3* (emisi tidak langsung lainnya dari rantai nilai) (GRI 305, 2016).

Pengungkapan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana transparansi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan terkait tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan. Dengan meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat, perusahaan diharapkan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan dampak lingkungan mereka, terutama di sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim, seperti pertambangan dan maskapai penerbangan (Sandy dan Ardiana, 2023).

Kualitas pengungkapan emisi karbon dapat diukur melalui sejauh mana perusahaan memenuhi standar pelaporan yang telah ditetapkan, seperti GRI 305. Kualitas ini mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, kualitas CED akan dievaluasi berdasarkan sejauh mana perusahaan memenuhi ketujuh item pengungkapan dalam GRI 305. Nilai CED adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



gabungan dari aspek kuantitatif dan kualitatif, dan kemudian akan diperingkat yang menunjukkan kualitas CED.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan aktivitas mereka dan norma-norma perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks pengungkapan emisi karbon, perusahaan di sektor pertambangan, yang merupakan industri yang lebih sensitif terhadap isu lingkungan, dihadapkan pada tekanan yang lebih besar dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, regulator, dan investor. Oleh karena itu, perusahaan di sektor ini cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan emisi karbon mereka untuk mempertahankan legitimasi sosial dan menghindari sanksi hukum, ekonomi, atau sosial (Ngatimin et al., 2023).

Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam aktivitas perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan investor. Dalam konteks CED, perusahaan di sektor pertambangan, yang memiliki dampak lingkungan yang lebih besar, diharapkan untuk lebih transparan dalam melaporkan emisi karbon mereka untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Pengungkapan ini tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan (Ariani et al., 2024).

Sektor pertambangan dan maskapai penerbangan menjadi sorotan utama dalam pengungkapan emisi karbon karena kontribusi signifikan mereka terhadap emisi gas rumah kaca. Penelitian Probosari dan Kawedar (2019) menunjukkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bahwa perusahaan dalam industri yang intensif emisi, seperti energi, transportasi, material, dan utilitas, cenderung memberikan pengungkapan emisi karbon sukarela yang lebih besar untuk memenuhi tekanan dari masyarakat dan mendapatkan legitimasi sosial. Selain itu, laporan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) mengidentifikasi enam sektor dengan risiko peralihan yang lebih tinggi berdasarkan kontribusinya terhadap emisi CO₂ global, termasuk sektor pertambangan dan maskapai penerbangan (TCFD, 2019).

Berdasarkan kedua teori ini, dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan seharusnya lebih ketat dalam pengungkapan emisi karbon karena dihadapkan pada tekanan yang lebih besar dari pemangku kepentingan dan aturan yang lebih ketat. Industri pertambangan, yang merupakan industri yang lebih sensitif terhadap isu lingkungan, memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim melalui emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas penambangan dan pengolahan sumber daya alam. Oleh karena itu, perusahaan di sektor ini cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan emisi karbon mereka untuk mempertahankan legitimasi sosial dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Sebaliknya, meskipun maskapai penerbangan juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan, tekanan yang dihadapi oleh perusahaan di sektor ini mungkin tidak sebesar yang dihadapi oleh perusahaan di sektor pertambangan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam regulasi, tingkat pengawasan, dan harapan dari pemangku kepentingan. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan isu perubahan iklim, perusahaan di sektor maskapai penerbangan juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan emisi karbon mereka.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Kualitas *Carbon Emissions Disclosure*

Kualitas *carbon emission disclosure* pada penelitian ini dijadikan sebagai alat untuk pemeringkatan nilai CED, nilai CED ini didapat dengan cara melakukan metode konten analisis isi. Metode konten analisis isi dilakukan dengan cara, yaitu peneliti melakukan penelitian mendalam pada *sustainability report* dari 15 perusahaan yang sudah terpilih untuk di teliti. Kemudian peneliti melakukan penilaian atas pengungkapan GRI 305: *Emissions* dari ke-15 perusahaan tersebut dengan metode kuantitatif dan juga kualitatif, untuk kuantitatif yaitu skor maksimalnya adalah lima dan untuk kualitatif yaitu skor maksimalnya adalah delapan. Setelah melakukan penilaian terhadap ketujuh item GRI 305: *Emissions*, selanjutnya peneliti membuat tabel hasil scoring kuantitatif dan kualitatif untuk sektor pertambangan dan maskapai penerbangan secara terpisah.

Dalam tabel hasil scoring ini berisikan total skor pengungkapan GRI 305 secara keseluruhan per emiten per tahun, dan juga rata rata skor dari setiap item GRI 305 per tahun baik untuk kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya peneliti membuat tabel analisis untuk masing masing sektor. Tabel analisis ini berisikan tabel rata rata skor per item per tahun untuk metode kuantitatif dan kualitatif, tabel rata rata skor per emiten per tahun untuk metode kuantitatif dan kualitatif.

Selanjutnya peneliti membuat tabel tingkat kualitas dari kedua sektor secara terpisah. Pertama-tama peneliti membuat tabel tingkat kualitas untuk metode kuantitatif dengan membagi jumlah skor 4 tahun per emiten dibagi dengan skor maksimal GRI 305 yang kemudian menghasilkan persentase kepatuhan. Kemudian peneliti menghitung interval kelas untuk menentukan tingkat kualitas dari setiap emiten secara kuantitatif. Hal serupa dilakukan untuk menghitung tingkat kualitas dengan metode kualitatif.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kemudian setelah peneliti sudah mendapatkan tingkat kualitas untuk metode kuantitatif dan kualitatif, kemudian peneliti menggabungkan nilai kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan nilai *carbon emission disclosure* untuk setiap perusahaan secara menyeluruh. Peneliti menggabungkan kedua nilai tersebut dengan cara memberi peringkat untuk metode kuantitatif dan juga metode kualitatif, memberikan peringkat dengan kriteria semakin besar nilai maka semakin baik. Setelah itu peneliti menyatukan kedua peringkat tersebut dengan rumus pitagoras berdasarkan Marasabessy (2021) yang kemudian menghasilkan nilai *carbon emission disclosure* gabungan, dan nilai inilah yang disebut CED dalam penelitian ini. Setelah mendapatkan nilai gabungan ini, peneliti memberikan peringkat lagi dengan kriteria semakin kecil maka semakin tinggi peringkatnya. Peringkat tertinggi adalah perusahaan yang paling baik kualitasnya dalam mengungkapkan emisi karbon. Pemeringkatan dari nilai CED inilah yang disebut sebagai kualitas *carbon emission disclosure*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.3
Karakteristik Aliran Akuntansi

Karakteristik	Anglo-Saxon	Asia Timur	Latin
Basis Akuntansi	Berbasis Aturan	Beragam, cenderung berbasis aturan	Berbasis aturan
Pengaruh Hukum & Pajak	Hukum Umum (Pajak terpisah dari Akuntansi)	Beragam, Pengaruh pemerintah kuat	Hukum kode sipil, pajak terintegrasi dengan akuntansi
Tingkat Pengungkapan	Tinggi	Sedang	Rendah
Orientasi Akuntansi	Orientasi pada Investor	Orientasi pada Stakeholder	Berorientasi pada pemerintah dan kreditor
Perkembangan Historis & Budaya	Individualisme, pasar modal yang kuat	Konfusianisme, kepemimpinan pemerintah dalam pembangunan ekonomi	Pengaruh budaya Romawi, peran pemerintah yang signifikan

Sumber: Douplik dan Perera (2018), Nobes dan Parker (2020) dan diolah kembali oleh peneliti (2024)

Berdasarkan Tabel 2.3, aliran akuntansi *Anglo-Saxon* dipengaruhi oleh signifikansi faktor hukum umum, berbeda dengan aliran Asia Timur dipengaruhi oleh signifikansi hukum yang lebih beragam. Selanjutnya Asia Timur, berbeda dengan Latin yang dipengaruhi signifikansi hukum kode sipil (Doupnik & Perera, 2018). Dengan demikian standar akuntansi juga standar GRI yang diproduksi setiap aliran jelas dipengaruhi oleh faktor utama signifikansi masing-masing aliran akuntansi dengan horizon waktu masing-masing mulai dari sangat lama, lama dan belum terlalu lama. Pada tataran praktek pengungkapan laporan keberlanjutan, aliran akuntansi *Anglo-Saxon* memiliki tingkat pengungkapan yang tinggi, menunjukkan bahwa negara-negara yang menganut sistem ini cenderung lebih transparan, memiliki tingkat pengungkapan yang lebih baik, serta lebih dapat dipercaya. Sistem *Anglo-Saxon* memiliki keterkaitan erat dengan aspek hukum, sehingga standar akuntansi yang dihasilkan, termasuk standar pelaporan keberlanjutan seperti GRI (*Global Reporting Initiative*), bersumber dari regulasi yang berlaku. Akibatnya, pengungkapan informasi dalam sistem ini lebih menekankan pemenuhan aspek hukum dibandingkan dengan aliran akuntansi lainnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.